

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### II.1. Ekonomi Pedesaan

Menurut Maki dan Lichty (2000)<sup>11</sup>, daerah pedesaan berbatasan dengan daerah perkotaan dengan tapal batas adalah daerah *commuting* terluar dari perkotaan. Daerah pedesaan memiliki wilayah yang luas dengan radius wilayah antara 60-100 kilometer dari area pusat, namun jumlah penduduknya tidak sebanyak daerah perkotaan sehingga kepadatan penduduknya rendah. Mayoritas penduduknya bergerak di sektor pertanian karena adanya sumber daya tanah yang cukup luas dan masih murah. Selain bertani, satu atau beberapa anggota keluarga di pedesaan menjadi pekerja, baik di desa maupun di kota, sebagai tambahan pendapatan di luar sektor pertanian. Pekerjaan di luar pertanian bersumber dari perusahaan manufaktur yang membangun pabrik di daerah pedesaan serta sektor perdagangan dan jasa yang berkembang di pedesaan. Daerah pedesaan menjadi sumber tenaga kerja murah bagi industri manufaktur dan jasa.

Daerah pedesaan memiliki berbagai karakteristik yang berbeda tergantung dari luas dan karakteristik wilayahnya serta jaraknya dari daerah perkotaan. Perbedaan ini berpengaruh pada diversifikasi jenis pekerjaan dan kegiatan sehari-hari penduduknya. Semakin luas wilayahnya dan beragam karakteristiknya misal wilayahnya mencakup daerah pegunungan dan pantai, maka jenis pekerjaannya mencakup sektor pertanian dan perikanan. Semakin dekat dengan kota juga membuat jenis pekerjaan semakin beragam. Perusahaan manufaktur akan banyak yang mendirikan pabriknya di daerah pedesaan yang relatif masih dekat dengan kota untuk mendapatkan efisiensi biaya yang optimal dari rendahnya biaya sewa tanah, upah buruh, pemeliharaan lingkungan, dan distribusi.

Berdasarkan penelitian Bappenas (2003)<sup>12</sup>, secara administratif hingga tahun 2001, wilayah pedesaan mencapai 78,6% dari seluruh wilayah Indonesia. Dalam skala nasional, pekerjaan utama terbesar penduduk Indonesia, yaitu sebesar

---

<sup>11</sup> Maki, Wilbur R. dan Lichty, Richard W. *Urban Regional Economics: Concepts, Tools, Applications*. Iowa: Iowa State University Press. Hal: 375.

<sup>12</sup> Direktorat Permukiman dan Perumahan, BAPPENAS. *Pengembangan Sumber Daya Lahan Di Kawasan Pedesaan*. Jakarta: BAPPENAS. Hal. 3-4.

43,2%, bekerja di bidang pertanian, yang merupakan frekuensi terbanyak dibandingkan pekerjaan di bidang lainnya. Keadaan ini menunjukkan, bahwa sektor pertanian, terutama di wilayah pedesaan, masih memegang peranan penting bagi kontribusi perekonomian regional maupun nasional. Petani di pedesaan memiliki posisi yang penting sebagai salah satu subjek pelaku ekonomi dalam tatanan lokal, regional bahkan nasional.

Beberapa faktor yang saling berkaitan dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan atau petani umumnya, faktor-faktor tersebut adalah; Ketidakberdayaan (*Powerlessness*), Kelemahan fisik (*Physical weakness*), Kemiskinan (*Poverty*), Keterisolasian (*Isolation*) dan Rentan (*Vulnerability*). Faktor-faktor tersebut menjadikan masyarakat pedesaan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat perkotaan.

Tabel II. 1. Jumlah penduduk miskin perkotaan dan pedesaan 1996-1999

Kelompok Pulau	Penduduk miskin Kota (Juta Jiwa)			Penduduk miskin Desa (Juta Jiwa)		
	1996	1999	g	1996	1999	g
Sumatera	1,5	2,6	73,3%	4,8	6,0	25,0%
Jawa+Bali	6,8	11,3	66,2%	12,5	17,5	40,0%
Kalimantan	0,2	0,3	50,0%	1,4	1,9	35,7%
Sulawesi	0,5	0,7	40,0%	2,1	2,3	9,5%
Irian+NTB+Pulau lainnya	0,5	0,7	40,0%	4,2	5,0	19,0%
<b>JUMLAH</b>	<b>9,5</b>	<b>15,6</b>	<b>64,2%</b>	<b>25,0</b>	<b>32,7</b>	<b>30,8%</b>

Sumber: BPS (2000) yang diolah Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas

Tabel II.1 menggambarkan perubahan angka penduduk miskin pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia selalu lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk miskin dari 1996 hingga 1999 mencapai 64,2% di wilayah perkotaan dan 30,8% di wilayah pedesaan. Peningkatan tersebut lebih terkonsentrasi di wilayah pedesaan Jawa dan Bali, hal ini salah satunya disebabkan oleh ketergantungan terhadap ketersediaan sumber-sumber pangan

relatif lebih tinggi<sup>13</sup>. Peningkatan angka kemiskinan lebih besar di wilayah perkotaan dibanding di pedesaan disebabkan masyarakat di pedesaan lebih tahan terhadap krisis dibanding masyarakat perkotaan.

Tabel II. 2. Jumlah penduduk miskin perkotaan dan pedesaan 2006-2007

Kelompok Pulau	Penduduk miskin Kota (Juta Jiwa)			Penduduk miskin Desa (Juta Jiwa)		
	2006	2007	g	2006	2007	g
Sumatera	2,91	2,75	-5,6%	5,31	5,10	-4,0%
Jawa+Bali	9,87	9,18	-7,0%	12,83	12,15	-5,3%
Kalimantan	0,43	0,41	-4,4%	1,02	0,94	-8,0%
Sulawesi	0,43	0,42	-4,2%	2,43	2,37	-2,2%
Papua+Maluku+NTB+Pulau lainnya	0,84	0,80	-4,5%	3,23	3,05	-5,3%
<b>Jumlah</b>	<b>14,49</b>	<b>13,56</b>	<b>-6,4%</b>	<b>24,81</b>	<b>23,61</b>	<b>-4,8%</b>

Sumber: Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, BPS (2007)

Tabel II.2 1 menggambarkan perubahan angka penduduk miskin pada saat perekonomian mengalami pertumbuhan. Jumlah penduduk miskin dari tahun 2006 ke 2007 berkurang sebesar 6,4% di perkotaan dan 4,8% di pedesaan. Laju pengurangan angka kemiskinan dipedesaan yang lebih rendah dibanding di perkotaan menunjukkan bahwa masyarakat di perkotaan lebih mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi nasional.

## II.2. Konsep tentang Kemiskinan

Dalam Handayani (2004)<sup>14</sup>, istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Untuk memahami pengertian tentang kemiskinan ada beberapa pendapat yang dikemukakan.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Handayani, Ning. *Peran Dana Kukesra dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Kelompok Uppks di Desa Tawang Sari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004

Menurut Suparlan (1995), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Baswir (1997: 23) dalam Syaiful Bahri<sup>15</sup> (2005: 13), secara sosio-ekonomis terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu :

1. Kemiskinan absolut adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, kalori, GNP per kapita, pengeluaran konsumsi dan lain-lain.
2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa yang lain.

Di samping itu terdapat juga bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan). Ia terdiri dari: (1) Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan kultural, dan (3) Kemiskinan struktural (Kartasmita, 1996: 235, Sumodiningrat, 1998: 67, dan Baswir, 1997: 23).

1. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (1997: 21) kemiskinan natural adalah kemiskinan yang

---

<sup>15</sup> Bahri, Syaiful. *Faktor - Faktor Determinan yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada Program Gerdu Taskin di Kabupaten Jombang*. Tesis Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya: 2005.

disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasmita (1996: 235) disebut sebagai “*Persisten Poverty*” yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir.

2. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Baswir (1997: 21) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya.
3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu (Baswir, 1997: 21). Selanjutnya Sumodiningrat (1998: 27) mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Menurut Kartasmita (1996: 236) hal ini disebut “*accidental poverty*”, yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Lain halnya dengan pendapat Chambers yang menyatakan ada lima masalah yang melingkari kehidupan orang atau keluarga miskin, yaitu:

- a. Kemiskinan (*poverty*)
- b. Fisik yang lemah (*physical weakness*)

- c. Kerentanan (*vulnerability*)
- d. Keterisolasian (*isolation*)
- e. Ketidakberdayaan (*powerlessness*).

Kelima hal tersebut merupakan kondisi nyata yang ada pada masyarakat miskin di negara berkembang.

Amartya Sen dalam Ismawan (2003)<sup>16</sup> berpendapat bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketiadaan akses, maka manusia mempunyai keterbatasan (atau bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa yang (terpaksa) saat ini dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya dilakukan. Akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.

Menurut Kuncoro (2000)<sup>17</sup> yang mengutip Sharp, penyebab kemiskinan adalah:

1. Secara mikro kemiskinan minimal karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya juga rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Masalah-masalah kemiskinan tersebut di atas menurut Nurkese (dalam Sumodiningrat. 1999: 150) sebagai suatu "*lingkaran setan kemiskinan*" yang meliputi enam unsur, yaitu : keterbelakangan, kekurangan modal, investasi rendah, tabungan rendah, pendapatan rendah, produksi rendah. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan

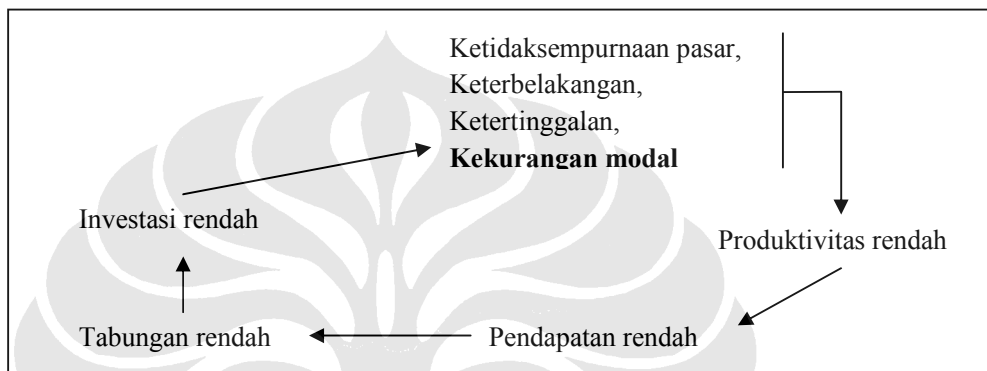
---

<sup>16</sup> Ismawan, Bambang. *Peran Lembaga Keuangan Mikro. Journal of Indonesia Economy and Business*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 2003.

<sup>17</sup> Kuncoro, Mudrajad. *Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN, 2000.

rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya (Bagan II.1). Logika berpikir ini dikemukakan oleh Nurkse dalam Handayani (2004), yang mengatakan “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

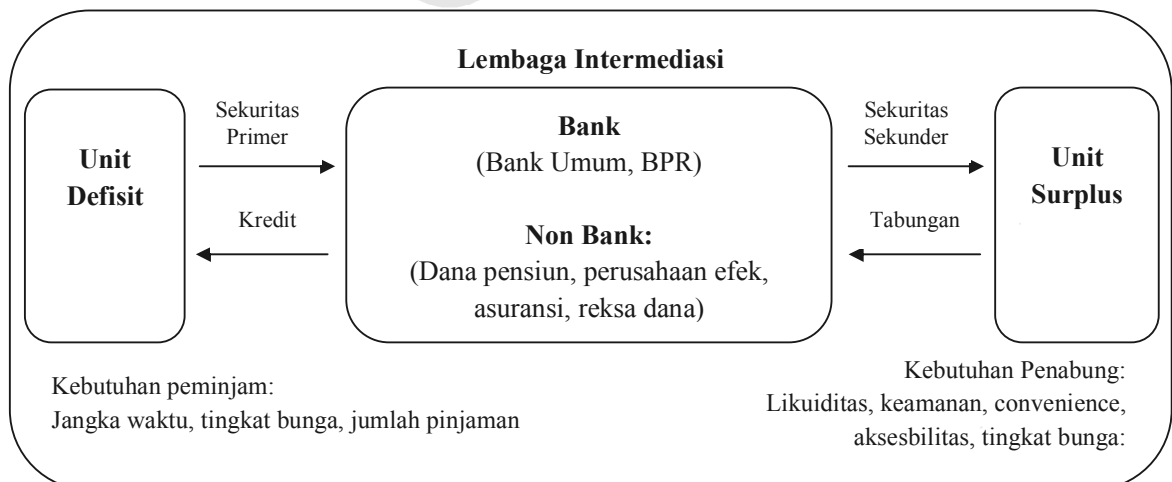
Bagan II. 1. Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*)



### II.3. Lembaga Keuangan

Siamat, D (2000)<sup>18</sup> menjelaskan pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims asset*) dibandingkan dengan aset non finansial (*riil asset*). Peran lembaga keuangan adalah sebagai intermediasi dalam kegiatan pengalihan dana dari penabung kepada peminjam. Bagan II.1. memberikan penjelasan bagaimana lembaga keuangan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Bagan II. 2. Proses Intermediasi Keuangan



Siamat, D (2000)<sup>19</sup> juga menjelaskan bahwa meningkatnya peran lembaga keuangan dalam perekonomian modern dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain:

- 1) Meningkatnya pendapatan masyarakat yang mengakibatkan kemampuan untuk menabung naik.
- 2) Perkembangan industri dan teknologi yang membuat sektor industri membutuhkan modal untuk investasi.
- 3) Denominasi instrumen keuangan yang membuat hampir semua kalangan dapat memperoleh layanan jasa keuangan.
- 4) Skala ekonomi yang besar dan berbagai produk jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan sehingga biaya produk atau jasa per unit menjadi lebih rendah
- 5) Semakin beragamnya jasa likuiditas yang diciptakan dan dijual lembaga keuangan.
- 6) Keuntungan jangka panjang yang didapat dari *spread* antara pendapatan dari bunga pinjaman dan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan.
- 7) Resiko yang dihadapi penabung lebih kecil karena adanya pengawasan dan peraturan yang ketat dari otoritas moneter dan adanya program penjaminan atas simpanan.

#### **II.4. Lembaga Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan**

Smith (2002)<sup>20</sup> mengungkapkan bahwa keberadaan lembaga keuangan di pedesaan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan sebagai intermedator antara individu yang ingin menabung dan yang ingin meminjam. Dalam perekonomian modern, modal berperan besar dalam pembangunan ekonomi sehingga akses kepada lembaga keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan untuk mengembangkan usahanya.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Smith, Joseph A. *Financial Institutions and Rural Economic Development*. Durham: Rural Lending Conference, 2002.



Berdasarkan penelitian Smith di Amerika, Bank cenderung mengurangi perannya di wilayah pedesaan, namun lembaga keuangan non Bank justru meningkatkan penetrasinya. Hal ini dapat terjadi karena tiga hal, yaitu:

a) Biaya yang terlalu mahal.

Kombinasi antara kondisi di pedesaan yang kepadatan penduduknya rendah, jumlah pinjaman yang kecil dan resiko kredit yang tinggi, menyebabkan biaya yang besar bagi Bank untuk menyalurkan kredit di pedesaan. Sebaliknya lembaga keuangan non-Bank di pedesaan memiliki struktur biaya yang lebih rendah.

b) Regulasi

Dengan biaya yang tinggi, seharusnya bank dapat menaikkan suku bunga di pedesaan, namun seringkali regulasi dari pemerintah melarang bank mengenakan bunga tinggi bagi usaha mikro di pedesaan. Sementara lembaga keuangan non Bank tidak ada batasan suku bunga.

c) Kultur masyarakat desa

Kultur masyarakat di pedesaan yang cenderung menolak modernisasi menyebabkan masyarakatnya tetap bertahan dengan kredit kecil, baik di pertanian, industri kecil dan jasa pendukungnya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Smith menganjurkan pendekatan sebagai berikut:

a) Kerjasama antara pemerintah, LSM dan sektor swasta, termasuk perbankan dalam menyamakan persepsi karakter ekonomi pedesaan dan apa yang mereka butuhkan.

b) Menyadari besarnya peluang pasar di pedesaan, seharusnya perbankan dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan non bank (lembaga keuangan mikro) dalam penyaluran kredit di pedesaan.

## II.5. Lembaga Keuangan Mikro

### II.5.1. Definisi Lembaga Keuangan Mikro

Terdapat berbagai pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau *Micro Finance Institution* (MFI). Diantaranya adalah:

- Menurut Rudjito (2003), LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Sedangkan menurut BRI, *microfinance* didefinisikan sebagai pelayanan kredit di bawah Rp. 50 juta.
- Rogaly & Fisher (1999) mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan pinjaman dengan nominal kecil, menerima penyimpanan deposit dengan nilai nominal kecil, menyediakan asuransi dan servis finansial lain seperti fasilitas transfer uang, dan pelatihan mengenai institusi dan alat finansial kepada para rakyat miskin yang tidak memiliki akses.
- Dr. Farhad Hossain (University of Tampere, Department of Administrative Science) mendefinisikan LKM sebagai berikut: “*Microfinance is the practice of offering small, collateral-free loans to members of cooperatives who otherwise would not have access to the capital necessary to begin small business or other income generating activities.*”

*Microcredit Summit* di Wasington mensyaratkan 4 prinsip utama yang harus dimiliki oleh Lembaga Keuangan Mikro<sup>21</sup>. Adapun prinsip-prinsip utama tersebut adalah :

1. *Reaching the poorest*

*The poorest* yang dimaksud adalah masyarakat paling miskin, namun secara ekonomi mereka aktif (*economically active*). Secara internasional mereka dipahami merupakan separo bagian bawah dari garis kemiskinan nasional.

2. *Reaching and empowering women*

Wanita merupakan korban yang paling menderita dalam kemiskinan, oleh sebab itu mereka harus menjadi fokus utama. Disamping itu, dari pengalaman lapangan di berbagai negara menunjukkan bahwa wanita merupakan peminjam, pemakai dan pengembali kredit yang baik.

<sup>21</sup> Ismawan, Bambang. “Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonom Daerah”. [www.jurnalekonomirakyat.org](http://www.jurnalekonomirakyat.org)

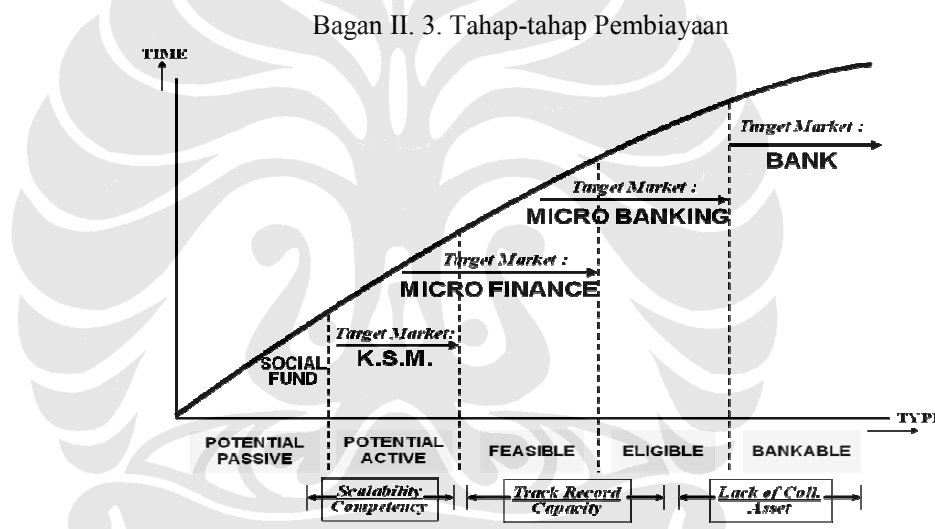
3. *Building financially sustainable institution*

Agar secara terus menerus dapat melayani masyarakat miskin, sehingga semakin banyak yang terlayani, maka secara financial kelembagaan tersebut harus terjamin berkelanjutan, bukan sekedar proyek yang memiliki batas waktu.

4. *Measurable impact*

Dampak dari kehadiran kelembagaan dapat diukur sehingga evaluasi dapat dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk perbaikan kinerja kelembagaan.

Soesilo, Nining I (2008)<sup>22</sup> mengelompokkan Lembaga Keuangan berdasarkan tingkatan masyarakat dalam gambar berikut:



Bagan II.2. memperlihatkan tingkatan (*stage*) jenis pelayanan jasa keuangan berdasarkan jenis kemampuan nasabah. Berdasarkan kurva tersebut, target pasar LKM adalah masyarakat yang memiliki usaha yang tergolong *potential active*, *feasible*, dan *eligible* untuk dibiayai namun belum tergolong *bankable*. *Potential active* dimaksudkan bagi usaha mikro yang memiliki usaha mandiri yang masih bersifat ekonomi rumah tangga, yang usahanya masih ditujukan untuk mempertahankan kehidupannya. *Feasible* adalah tahap berikutnya dimana usaha yang dijalankan sudah berkembang lebih besar

<sup>22</sup> Soesilo, Nining I. *Uji Coba Penerapan Metoda Grameen Bank di Kota Depok dalam Upaya Membuat Kebijakan Penyaluran Dana PEMDA di Indonesia*. Depok: Riset Unggulan UI 2008.

namun belum optimal karena kurangnya modal, sedangkan modal dari perbankan belum bisa diperoleh karena ketiadaan aset sebagai agunan tambahan. Setelah skala usahanya cukup besar, aset yang dimiliki layak menjadi agunan tambahan, maka ia dapat digolongkan *eligible*. Pada tahap ini ia sudah dapat dipromosikan ke lembaga keuangan mikro yang cara kerjanya sama dengan Bank namun melayani kredit mikro, yaitu *microbanking* (BPR).

### II.5.2. Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah badan usaha keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan mikro. Bentuk LKM sendiri dapat berupa Bank, Koperasi dan yang tidak berbentuk bank dan tidak berbentuk Koperasi, termasuk Badan Kredit Desa (BKD) dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bank, selanjutnya disebut juga sebagai LKM Non Bank Non Koperasi (LKM NBNK).

Asas LKM adalah:

- a. Memberikan manfaat dan pemberdayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. Saling menguntungkan; dan
- c. Menggunakan prinsip kehati-hatian.

Tujuan pendirian LKM adalah mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan jasa keuangan mikro dalam rangka pemberdayaan, peningkatan produktivitas dan pendapatan serta kesejahteraan.

Terkait dengan setiap orang atau badan hukum yang mendirikan LKM, maka dapat memilih salah satu dari badan hukum Indonesia berikut:

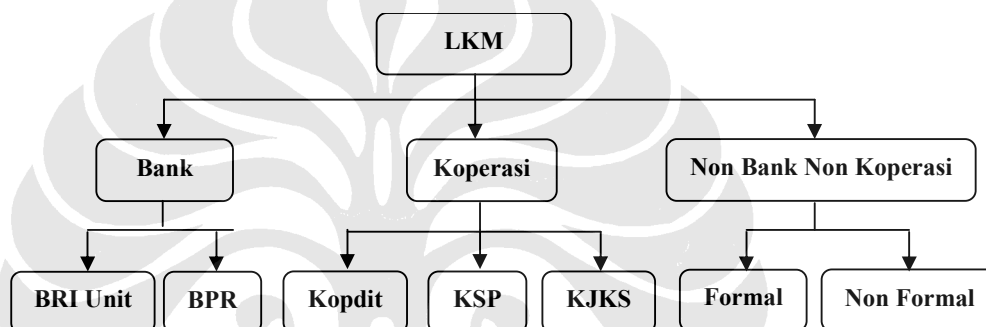
- a. Perkumpulan;
- b. Perseroan Terbatas;
- c. Perusahaan Daerah.

Selain itu, LKM juga dapat berbentuk Badan Usaha Milik Desa baik yang didasarkan pada kesatuan masyarakat hukum adat atau kesatuan wilayah administratif sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian dari prinsip LKM adalah adanya larangan kepemilikan atau penguasaan oleh warga negara asing atau oleh badan hukum apapun yang dimiliki atau dikuasai baik sebagian atau seluruhnya oleh warga negara asing. Dan setiap orang atau badan hukum dilarang memegang kepemilikan mayoritas di lebih dari satu LKM, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Slamet Riyadi (2008)<sup>23</sup> memetakan LKM di Indonesia berdasarkan bagan berikut:

Bagan II. 4. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Mikro



Sumber: FGD “Pola Hubungan Bank dan LKM”, Jakarta, 2008.

LKM berbentuk bank yang dijalankan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit diatur oleh undang-undang perbankan yaitu UU no. 7 tahun 1992 dan UU no. 10 tahun 1998. LKM berbentuk koperasi dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) diatur dengan UU Koperasi no. 25 tahun 1992.

LKM non-bank dan non-koperasi (NBNK) formal memiliki payung hukum Peraturan Daerah. LKM jenis ini biasanya tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu, misal: Lembaga Perkreditan Desa di Bali, Lumbung Pitih Nagari di Sumatra Barat dan LPP UMKM di Kabupaten Tangerang. Sedangkan LKM NBNK yang tergolong non formal belum memiliki payung hukum yang mengaturlaksana dan tata kelolanya. LKM jenis ini antara lain: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Baitul Maal Wat

<sup>23</sup> Riyadi, Slamet. *FGD: Pola Hubungan Bank dan LKM*. Jakarta: BRI, 27 Me 2008.

Tamwil (BMT), dan lain-lain. Untuk infrastruktur dan kelembagaannya secara lengkap dalam tabel II.2 berikut:

Tabel II. 3. Infrastruktur dan Kelembagaan LKM

<b>ASPEK</b>	<b>BPR/S, BRI Unit</b>	<b>KOPERASI</b>	<b>NBNK FORMAL</b>	<b>NBNK INFORMAL</b>
<b>Regulasi</b>	UU Perbankan	UU Koperasi	Perda	-
<b>Regulator</b>	Bank Indonesia	Menegkop	Pemda	-
<b>Pembinaan</b>	Bank Indonesia	Menegkop	Dinas Terkait	-
<b>Penjaminan</b>	Pemerintah / BI	-	-	-
<b>Likuiditas</b>	Bank Indonesia	-	-	-
<b>Rating</b>	BI – Tingkat Kesehatan	Menegkop – Tingkat Kesehatan	-	-
<b>Asosiasi</b>	Perbarindo/ Asbisindo	Induk/Pusat Koperasi	-	-

Sumber: FGD Pola Capacity Building LKM untuk Mendukung Penyerapan Dana KUR Mikro

Kapasitas masing-masing jenis LKM tersebut dijelaskan dalam tabel II.3. yang membedakan antara BRI unit, BPR/BPRS, koperasi dan LKM non Bank non Koperasi sebagai berikut:

Tabel II. 4. Perbandingan Karakter dan Kapasitas dari Jenis-jenis LKM

<b>BRI Unit</b>	<b>BPR/S</b>	<b>Koperasi (KSP/USP/KJKS)</b>	<b>LKM Non Bank Non Koperasi (NBNK)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan menghimpun dana pihak ketiga sudah teruji dengan keberhasilan BRI unit menghimpun nasabah +/- 22 juta <i>account</i> dan dana masyarakat sebesar +/- Rp. 45 Trilyun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan menghimpun dana masih mengandalkan tingkat suku bunga di atas rata-rata bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan menghimpun dana lebih didasarkan pada kemampuan anggota dan pengurus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan menghimpun dana sangat terbatas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan menyalurkan dana cukup berhasil dengan rasio LDR diatas rata-rata bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan menyalurkan baik dilihat dari rasio LDR di atas 90%, namun kualitas aktiva relatif masih perlu diperhatikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan penyaluran dana masih terkendala oleh keterbatasan SDM dan pengalaman usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan menyalurkan dana masih terkendala oleh keterbatasan SDM dan pengalaman usaha</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan manajemen operasional sudah teruji dengan dukungan pelatihan, teknologi, dan supervisi BRI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan manajemen operasional masih tergantung pada beberapa SDM kunci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan manajemen operasional untuk beberapa KSP sudah baik namun secara umum masih banyak kekurangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan manajemen operasional masih tergantung pada pengurus</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan menghasilkan laba baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan menghasilkan laba relatif baik, dimana ROE dan ROA diatas bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan menghasilkan laba relatif terbatas khususnya untuk USP yang memiliki modal kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan menghasilkan laba tergantung dari kemampuan dan komitmen anggota</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan jaringan dan akses pasar semakin luas dengan fokus pada UMK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan jaringan dan akses pasar masih terbatas dengan fokus pada usaha perdagangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan jaringan dan akses pasar relatif terbatas kecuali untuk KSP tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan jaringan dan akses pasar masih terbatas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan di sisi pelaporan, MIS dan perencanaan relatif sudah baik dan standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan di sisi pelaporan, MIS dan perencanaan masih beragam, khususnya untuk BPR yang memiliki modal terbatas dan beroperasi di luar Jawa dan Bali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan di sisi pelaporan, MIS dan perencanaan relatif masih harus ditingkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan di sisi pelaporan, MIS dan perencanaan masih kurang</li> </ul>

Sumber: FGD Pola Capacity Building LKM untuk Mendukung Penyerapan Dana KUR Mikro



## II.6. Penelitian dan Studi Sebelumnya

### II.6.1. M. Jahangir Alam Chowdhury, Dipak Ghosh, dan Robert E. Wright (2005)

Dalam studinya yang berjudul “The Impact of Micro-credit on Poverty: Evidence from Bangladesh”<sup>24</sup>, Chowdury, Gosh dan Wright meneliti dampak kredit mikro terhadap kemiskinan di Bangladesh. Di negara tersebut terdapat tiga Lembaga Keuangan Mikro (*Micro-Finance Institution / MFI*) yang besar dan operasinya masing-masing mencakup hampir seluruh wilayah Bangladesh, yaitu: Grameen Bank (GB), Association of Social Advancement (ASA), Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC). Mereka mengambil sampel dari anggota ketiga MFI tersebut.

Tabel II. 5. Perbandingan GB, BRAC dan ASA di Bangladesh pada tahun 2000

Variabel	GB	BRAC	ASA
Tahun berdiri	1976	1974	1991
Jumlah anggota (juta)	2,3	3,9	1,2
Jumlah karyawan	11.457	8.898	5.347
Jumlah cabang	1.170	780	824
Jumlah desa terlayani	40.346	58.539	22.740
Total pinjaman di tahun 2000 (juta US\$)	270	246	139
Total pinjaman kumulatif (milyar US\$)	3.3	1.0	0.47
Total pinjaman <i>outstanding</i> (juta US\$)	202	143	71
Total tabungan (juta US\$)	83,2	65	97
Total aset (juta US\$)	364	176	99
Rata-rata pinjaman per debitur (US\$)	113	108	116
Tingkat pengembalian	88,7%	98,4%	99,9%
Suku bunga nominal (per tahun)	20%	15%	15%

Sumber: Laporan Tahunan GB, BRAC dan ASA

Grameen Bank (GB) adalah pionir model pinjaman berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang yang memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang sama. Masing-masing anggota saling menjamin pinjaman yang lain

<sup>24</sup> *Progress in Development Studies* 5, 4, Edward Arnold (Publishers) Ltd. (2005). Hal. 298–309.

dalam kelompoknya. Jika ada satu anggota yang lalai menjalankan kewajiban angsurannya (bukan karena sebab musibah atau meninggal), maka anggota yang lain dalam kelompok tersebut tidak dapat mengajukan pinjaman kembali pada periode berikutnya. Angsuran dibayar per minggu selama 50 minggu.

BRAC didirikan setelah kemerdekaan Bangladesh (1971), dengan tujuan utama adalah rehabilitasi masyarakat pasca perang dengan Pakistan. BRAC kemudian berlanjut dan memperluas kegiatannya hingga meluncurkan program kredit mikro pada 1976. Program kredit mikro yang dijalankan saat ini ialah “Proyek Kredit Pedesaan” yang mulai dijalankan pada tahun 1990. Program BRAC lainnya adalah memberikan pendidikan informal dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat berpendapatan rendah di pedesaan.

ASA berdiri pada tahun 1978 dan memulai program kredit mikro pada tahun 1991. Model tabungan dan pinjaman mikro yang dikembangkan ASA dinilai lebih efektif dari segi biaya dan berkesinambungan dibanding Grameen Bank (Khalily *et al*, 2000).

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 954 keluarga yang disurvei dan wawancara langsung selama Januari hingga Mei 1999. Bangladesh dibagi menjadi 64 Distrik. Untuk menentukan distrik yang akan disurvei, digunakan dua kriteria. Pertama, distrik yang disurvei adalah yang relatif dekat dengan Dhaka (ibukota Bangladesh), alasannya untuk meringankan biaya dan simplisitas. Kedua distrik yang disurvei tidak terkena musibah banjir tahun 1998, karena musibah tersebut berakibat pada hilangnya harta benda dan kematian. Kemudian sampel dibagi berdasarkan lamanya responden bergabung dengan program kredit mikro dalam 3 kategori, yaitu: a) kurang dari 2 tahun, b) 2 – 4 tahun, c) 5 – 7 tahun dan d) > 8 tahun.

Penelitian ini menggunakan model sebagai berikut:

$$\text{Prob}(P = 1) = f(X_P, X_H, X_V)$$

$P$  adalah variabel dummy yang berkode 1 jika rumah tangga tergolong miskin dan kode 0 jika rumah tangga tergolong tidak miskin. Kategori miskin menggunakan dua metode, yang pertama adalah kemiskinan objektif, yaitu menggunakan standar garis kemiskinan PBB. Yang kedua adalah kemiskinan subjektif, yaitu dengan mencantumkan pertanyaan pada kuesioner: Apakah anda

merasa tergolong sebagai keluarga miskin jika mengacu pada pendapatan keluarga anda?

$X_p$  adalah variabel keikutsertaan dalam program kredit mikro. Variabel ini diestimasi menggunakan tiga spesifikasi model yang berbeda untuk memperoleh pengaruh durasi keikutsertaan pada program kredit mikro terhadap kemiskinan. Yang pertama adalah model linear sederhana:

$$X_p^1 = \alpha_1 L + \alpha_2 L \cdot D$$

$L$  adalah variabel dummy berkode 1 jika sudah menerima pinjaman dari program kredit mikro dan kode 0 jika belum.  $D$  adalah durasi keikutsertaan pada program kredit mikro, dihitung dalam satuan bulan. Spesifikasi yang kedua adalah model kuadratik:

$$X_p^2 = \alpha_1 L + \alpha_2 L \cdot D + \alpha_3 L \cdot D^2$$

Model ini untuk menguji *nonlinearity* dalam hubungan antara kemiskinan dan durasi program kredit mikro. Spesifikasi yang ketiga adalah mengganti variabel durasi program kredit mikro dengan serial variabel dummy yang mewakili 8 kategori durasi:

$$X_p^3 = \alpha_1 L + \alpha_2 D_6 + \alpha_3 D_{12} + \alpha_4 D_{24} + \alpha_5 D_{36} + \alpha_6 D_{48} + \alpha_7 D_{60} + \alpha_8 D_{72} \\ + \alpha_9 D_{84} + \alpha_{10} D_{96} + \alpha_{11} D_{>96}$$

$D_6$  adalah variabel dummy yang berkode 1 jika durasi program kredit mikro yang telah berjalan adalah di bawah 6 bulan dan berkode 0 jika tidak.  $D_{12}$  adalah variabel dummy yang berkode 1 jika durasi program kredit mikro yang telah berjalan adalah antara 7 hingga 12 bulan dan berkode 0 jika tidak, dan seterusnya.

$X_H$  adalah vektor rumah tangga yang menjelaskan karakter sosial dan ekonomi individu atau rumah tangga anggota program kredit mikro (GB, BRAC dan ASA). Variabel ini mencakup agama, kepemilikan lahan, pendidikan dan komposisi demografi dalam rumah tangga.  $X_V$  adalah vektor karakteristik desa yang menjelaskan infrastruktur yang tersedia di dalam desa tempat anggota tersebut tinggal. Variabel ini mencakup keberadaan sekolah dasar, sekolah lanjutan (*secondary school*), sumber air bersih, listrik di dalam desa tempat responden tinggal, juga jarak ke pasar terdekat, jalan beraspal, bank komersial, ibukota distrik dan Dhaka (ibukota Bangladesh).

Hasil penelitian ini adalah program kredit mikro terbukti berhasil mengurangi tingkat kemiskinan anggotanya, meski untuk secara permanen keluar dari kemiskinan membutuhkan jangka waktu yang panjang. Tingkat kemiskinan obyektif responden yang baru bergabung dengan program kredit mikro adalah 65% (anggota miskin terhadap seluruh anggota), setelah 8 tahun bergabung dengan kredit mikro tingkat kemiskinan responden turun hingga 45%. Artinya terjadi penurunan kemiskinan obyektif hingga sekitar 30%. Sedangkan untuk kemiskinan subyektif turun dari sekitar 85% hingga 45% setelah 8 tahun bergabung dengan program kredit mikro. Artinya terjadi penurunan kemiskinan subyektif sekitar 50% dalam 8 tahun atau sekitar 5% per tahun.

#### **II.6.2. Abu N.M. Wahid (1994)**

Dalam studinya yang berjudul “The Grameen Bank and Poverty Alleviation in Bangladesh: *Theory, Evidence and Limitations*”<sup>25</sup>, Wahid meneliti dampak kredit mikro Grameen Bank terhadap pengurangan kemiskinan anggotanya. Wahid dalam abstraksinya menyekakan bahwa persebaran praktek replikasi Grameen Bank di berbagai negara di seluruh dunia memunculkan perhatian cukup besar dari kalangan peneliti, pembuat kebijakan dan pemerhati bidang pembangunan di pedesaan.

Grameen Bank merupakan praktek perbankan yang unik karena ditujukan khusus bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah lebih dari setengah hektar atau tidak memiliki aset senilai lebih dari satu hektar tanah kualitas medium yang dapat ditanami. Grameen Bank juga memberikan bimbingan dan supervisi yang komprehensif bagi kegiatan usaha mandiri anggotanya, sehingga diharapkan para debitur dapat menggunakan pinjamannya bagi kegiatan yang produktif dan berhasil dalam mengembangkan usahanya. Grameen Bank juga aktif menyarankan anggotanya untuk menabung dalam rangka membeli saham (kepemilikan) pada Grameen Bank<sup>26</sup>. Selain itu, Grameen Bank juga mendorong anggotanya untuk keluar dari budaya yang tidak produktif dan untuk hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungannya.

---

<sup>25</sup> *American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 53, No. 1. (Jan., 1994), Hal. 1-15.

<sup>26</sup> Saat ini 90% dari total aset Grameen dimiliki oleh anggotanya.

Mahabub Hossain (1985)<sup>27</sup> berpendapat bahwa di pedesaan (miskin) Bangladesh, *opportunity cost* dari *leisure* sangat tinggi. Alhasil, rumah tangga miskin di Bangladesh ingin seluruh anggota keluarganya untuk bekerja di luar jam kerja normal dengan usaha mandiri. Untuk menciptakan usaha mandiri membutuhkan modal, sementara mereka tidak memiliki surplus pendapatan yang dapat diinvestasikan. Kredit kemudian menjadi satu-satunya solusi bagi mereka untuk belanja modal.

Dalam kondisi normal, dengan pendapatan rendah dan *Marginal Propensity to Consume* (MPC) yang tinggi, sulit bagi masyarakat miskin pedesaan untuk menghimpun tabungan untuk modal. Mereka pun membutuhkan pinjaman mikro dengan periode pelunasan yang cukup panjang dan tanpa agunan. Sementara lembaga keuangan konvensional tidak dapat memberikan pinjaman tanpa agunan tambahan dan dalam nominal yang kecil.

Dasar penelitian ini menggunakan dalil yang bersumber dari model kredit Baker-Hopkin, dengan formula:

$$\frac{CE}{E} = [(D/E)(r - i) + r](1 - c)$$

Dimana, E = jumlah modal, D = jumlah pinjaman, r = tingkat pengembalian aset (*rate of return on assets / ROA*), i = tingkat suku bunga pinjaman, c = tingkat konsumsi terhadap pendapatan di luar pendapatan dari aset, dan C = perubahan diskrit. Berdasarkan formula ini, selama ROA lebih tinggi dari tingkat suku bunga pinjaman, kredit dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga penerima pinjaman. Semakin besar tingkat pinjaman terhadap modal (D/E), semakin tinggi pertumbuhan pendapatan rumah tangga.

Penelitian ini mengevaluasi dan mengkritisi dampak Grameen Bank di antara anggota peminjam dari segi: partisipasi perempuan, lapangan pekerjaan, produktifitas, pendapatan, perumahan dan tingkat nutrisi.

a) Partisipasi Wanita

Grameen terbukti menjadi salah satu lembaga yang paling berhasil meningkatkan peran wanita pada aktivitas ekonomi meski saat penelitian ini dilakukan (1994) partisipasi wanita masih sebesar 9,1% dari seluruh tenaga kerja

---

<sup>27</sup> Hossain, Mahabub. *Rural Development Study*. Vol 11, Bangladesh Institute of Development Studies. Dhaka, 1985.

di Bangladesh. Tingginya tingkat partisipasi wanita di Grameen Bank dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: himpitan kemiskinan dan populasi tinggi, seringnya terjadi bencana alam, tingginya tingkat perceraian di kalangan keluarga miskin, serta perubahan budaya dalam hal keterlibatan perempuan di kegiatan *outdoor* dan untuk memiliki sedikit anak.

b) Pekerjaan

Hossain (1988)<sup>28</sup> membandingkan penciptaan lapangan kerja antara Grameen Bank, Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), Proshika, Bangladesh Rural Development Board (BRDB), dan Swanirbhar Bangladesh (SB). Hasilnya, BRAC paling banyak menciptakan lapangan pekerjaan bagi anggotanya, disusul dengan Grameen Bank dan SB. Grameen Bank adalah yang termuda di antara program sejenis lainnya tersebut.

c) Produktivitas

Alam (1988) melakukan studi untuk menghitung pertumbuhan produktivitas anggota Grameen Bank. Hasilnya, petani kecil anggota Grameen Bank merupakan yang tertinggi dalam mengalokasikan lahannya untuk intensifikasi pertanian (*high-yielding varieties / HYV*) hingga dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya. HYV ini membutuhkan biaya cukup besar untuk irigasi, pupuk dan pestisida, yang modalnya mereka dapat pinjaman dari Grameen Bank.

d) Pendapatan

Hossain (1985)<sup>29</sup> membandingkan peningkatan pendapatan per kapita anggota Grameen Bank dan anggota program sejenis lainnya. Hasilnya, para wanita anggota Grameen Bank mengalami peningkatan pendapatan per kapita terbesar, sedangkan anggota priaanya menempati urutan kedua di bawah Swanirbhar Bangladesh (SB).

e) Perumahan

Untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kondisi rumah, Grameen Bank menciptakan program pinjaman perumahan sejak 1984. Rahman dan Hasnat

---

<sup>28</sup> Hossain, Mahabub. *Credit for the Alleviation of Rural Poor: The Grameen Bank in Bangladesh*. International Food Policy Research Institute Washington DC dan Bangladesh Institute of Development Studies. Dhaka.,1988.

<sup>29</sup> *Op cit*.

(1993)<sup>30</sup> membuat analisa perbandingan kualitas perumahan anggota Grameen Bank sebelum dan sesudah mengambil pinjaman perumahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kualitas perumahan dari nasabah kredit perumahan Grameen Bank. Sebelum mengambil kredit perumahan, 57% anggota Grameen Bank hanya memiliki luas lantai sekitar 9 x 13,1 kaki (*feet*) dan hanya 2% yang memiliki luas lantai lebih dari 24 x 27 kaki. Setelah mengambil kredit perumahan, lebih dari 95% memiliki luas lantai di atas 20,1 x 22,13 kaki.

f) Nutrisi

Studi mengenai dampak terhadap nutrisi anggota Grameen Bank diteliti dengan membandingkan dua hasil penelitian di dua periode waktu yang berbeda. Pertama, oleh Institut Pangan dan Nutrisi Universitas Dhaka di tahun 1981-1982<sup>31</sup>. Studi tersebut menghasilkan rata-rata asupan makanan masyarakat Bangladesh sebesar 706 gram makanan per hari. Kedua, studi nutrisi yang dilakukan oleh Rahman (1986)<sup>32</sup> terhadap anggota dan non-anggota Grameen Bank. Hasilnya, rata-rata anggota Grameen Bank mengkonsumsi 857 gram makanan per hari, sedangkan non-anggota Grameen Bank mengkonsumsi 789 gram makanan per hari. Selain itu, di tahun 1981-1982 konsumsi gandum (makanan pokok) rata-rata masyarakat Bangladesh sebesar 65% dari total makanan. Di tahun 1986, konsumsi gandum anggota Grameen sebesar 58% dari total makanan, lebih rendah dibanding non-anggota yang 60%. Artinya, anggota Grameen Bank lebih mengutamakan kualitas makanannya dibanding kuantitasnya.

### II.6.3. Mahabub Hossain (2002)

Dalam penelitiannya yang berjudul “*Credit for Alleviation of Rural Poverty: The Experience of Grameen Bank in Bangladesh*”<sup>33</sup>, Hossain meneliti kinerja Grameen Bank dan dampaknya bagi perekonomian, dalam bidang: pasar

---

<sup>30</sup> Rahman, A., dan Hasnat, B. *Housing for the Rural Poor: The Grameen Bank Experience*. ed. Abu N. M Wahid *The Grameen Bank: Poverty Relief in Bangladesh*. Boulder, CO: Westview Press, 1993.

<sup>31</sup> Ahmad, K., dan Hassan, N. *Nutrition Survey of Rural Bangladesh*. Institute of Nutrition and Food, University of Dhaka. Dhaka, 1983.

<sup>32</sup> Rahman, A. *Impact of Grameen Bank on the Nutritional Status of the Rural Poor*. Bangladesh Institute of Development Studies. Dhaka, 1986.

<sup>33</sup> Hossain, Mahabub, dkk. *Early Impact of Grameen, A Multi-Dimensional Analysis: Outcome of a BIDS Research Study*. Dhaka: Grameen Trust, 2002.

kredit, akumulasi modal, lapangan pekerjaan, pendapatan, dan pertumbuhan populasi.

a) Dampak terhadap pasar kredit

Salah satu premis dalam Grameen Bank adalah orang miskin di luar sektor pertanian adalah yang paling banyak menjadi nasabah dari rentenir (*money lender*) dengan suku bunga sekitar 10% per bulan. Operasi para rentenir juga mencakup alur input dan output distribusi barang nasabahnya. Biasanya para rentenir memberikan pinjaman berupa barang mentah (*raw materials*), dengan syarat nasabahnya hanya menjual produk jadinya ke rentenir tersebut. Dengan sistem monopoli dan monopsoni tersebut, rentenir mendapat proporsi keuntungan terbesar. Setelah Grameen Bank hadir, masyarakat pun perlahan mengurangi ketergantungannya pada rentenir dengan menggunakan pinjaman dari Grameen Bank. Tabel II.5 menjelaskan perbedaan ketergantungan anggota Grameen Bank sebelum dan sesudah menjadi anggota.

Tabel II. 6. Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir Sebelum dan Sesudah Grameen Bank

Jenis Peminjam	Persentase anggota yang menerima kredit dari rentenir	
	Sebelum Bergabung Grameen Bank	Setelah Bergabung Grameen Bank
Jenis Kelamin		
Pria	23,6%	5,2%
Wanita	15,4%	0,7%
Bidang Usaha		
Industri	23,6%	4,9%
Perdagangan	24,5%	3,8%
Lainnya	12,2%	0,7%
Total	19,1%	2,8%

Sumber: Hossain (2002)

b) Dampak terhadap akumulasi modal

Dampak yang paling terasa dari kehadiran Grameen Bank adalah dalam akumulasi modal, baik modal tetap maupun tidak tetap. Perubahan tersebut dapat



dilihat pada tabel II.6. Dari 975 responden, sebelum bergabung dalam Grameen Bank hanya 47,4% yang menginvestasikan sebagian penghasilannya untuk modal kerja, setelah bergabung dalam Grameen Bank meningkat menjadi 81,9%. Dri nilai modal kerjanya, sebelum menjadi anggota Grameen rata-rata sebesar 743 taka, kemudian setelah menjadi anggota Grameen meningkat menjadi 2.811 taka.

Tabel II. 7. Perubahan Modal Kerja Setelah Menjadi Anggota Grameen Bank

Jenis Peminjam	Jumlah Sampel	Persentase Anggota yang Berinvestasi untuk Modal Kerja (dalam %)		Rata-rata Modal Kerja per Anggota (dalam Taka)	
		Sebelum GB	Setelah GB	Sebelum GB	Setelah GB
<b>Jenis Kelamin</b>					
Pria	441	54,1	85,0	1.237	4.141
Wanita	534	41,9	79,4	336	1.713
<b>Bidang Usaha</b>					
Industri	245	70,2	95,1	908	3.544
Perdagangan	319	49,2	87,5	1.166	4.083
Lainnya	411	32,4	69,8	316	1.386
Total	975	47,4	81,9	743	2.811

Sumber: Hossain (2002)

c) Dampak terhadap lapangan pekerjaan

Tujuan dari Grameen Bank adalah memberikan fasilitas pinjaman kepada pria dan wanita miskin untuk menciptakan usaha mandiri. Perubahan pada usaha anggota Grameen dapat dilihat pada tabel II.7. Dari 30,6% yang tidak memiliki usaha produktif sebelum menjadi anggota Grameen, setelah menjadi anggota Grameen berkurang menjadi hanya 11,4%. Yang paling signifikan adalah setengah dari jumlah wanita sebelum menjadi anggota Grameen tidak memiliki usaha produktif. Angka ini kemudian berkurang menjadi hanya seperlima saja setelah bergabung dengan Grameen. Selain itu, persentase anggota yang menjadi buruh tani menurun dari 10,1 menjadi hanya 1,0%.

Tabel II. 8. Perubahan Jenis Usaha Setelah Menjadi Anggota Grameen

Jenis Usaha	Sebelum Grameen			Saat disurvey		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
	(N=441)	(N=534)	(N=975)	(N=441)	(N=534)	(N=975)
Pemilik lahan pertanian	7,3%	0,4%	3,5%	6,3%	0,4%	3,1%
Buruh tani	20,0%	1,9%	10,1%	2,1%	0,2%	1,0%
Sektor pertanian lainnya	0,4%	0,9%	0,7%	6,5%	7,2%	6,9%
Manufaktur	17,2%	38,4%	28,8%	16,6%	53,4%	36,7%
Perdagangan	32,2%	5,4%	17,5%	46,3%	15,9%	29,6%
Transportasi	5,9%	0,2%	2,7%	9,5%	0,4%	4,9%
Konstruksi dan jasa lainnya	10,4%	2,4%	6,1%	12,7%	1,9%	5,3%
Tidak ada usaha produktif	6,6%	50,4%	30,6%	0,0%	20,8%	11,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber: Hossain (2002)

d) Dampak terhadap pendapatan

Mayoritas responden (91,2%) mengalami peningkatan pendapatan setelah bergabung dengan Grameen Bank. Hanya sekitar 2% yang pendapatannya erkurang dan 5,7% yang tetap. Pningkatan pendapatan terbesar dialami oleh anggota pria, sedangkan penurunan pendapatan terbesar dialami wanita (tabel II.8).

Tabel II. 9. Perubahan Pendapatan Setelah Menjadi Anggota Grameen Bank

Perubahan Pendapatan	Pria	Wanita	Total
Meningkat	92,7%	90,0%	91,2%
Tetap	5,2%	6,2%	5,7%
Berkurang	1,4%	2,2%	1,9%
Tidak menjawab	0,7%	1,7%	1,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber: Hossain (2002)

e) Dampak terhadap populasi

Berdasarkan survey yang dilakukan ternyata semaki lama menjadi anggota Grameen Bank, ukuran rumah tangga anggota semakin besar. Jadi, ada kesadaran yang membaik dari masyarakat Bangladesh pada umumnya untuk mengurangi jumlah anaknya.

Tabel II. 10. Ukuran Rumah Tangga Berdasarkan Lamanya Menjadi Anggota Grameen

Lama menjadi anggota Grameen	Rata-rata jumlah anggota Keluarga
1 tahun	5,25
2 tahun	5,28
3 tahun	5,77
4 tahun atau lebih	6,46

Sumber: Hossain (2002)



## **BAB III**

### **PROFIL LPP UMKM KABUPATEN TANGERANG**

#### **III.1. Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan**

Mulai tahun 2000 terjadi perubahan kondisi daerah, yaitu perubahan sistem pemerintahan sentralisasi ke arah otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999. Krisis moneter 1997 saat itu masih terasa dampaknya bahkan meluas menjadi berbagai krisis lainnya yang dirasakan terutama oleh masyarakat golongan ekonomi lemah.

Proyek pusat yang bersifat INPRES, BANPRES, dan sejenisnya tidak ada lagi di Kabupaten/Kota. Lembaga Keuangan Mikro yang sifat operasionalnya non perbankan (KUD, UEDSP, P2KP, dan lainnya) kurang mampu melayani kebutuhan permodalan masyarakat karena dilanda krisis dan berbagai keterbatasan kemampuan. Sedangkan yang sifat operasionalnya perbankan (Lembaga Perkreditan Kecamatan, BPR) tidak sanggup diakses oleh masyarakat karena ketiadaan jaminan/agunan sebagai syarat pinjaman, selain itu LPK hanya di Kabupaten Tangerang terbatas di 10 Kecamatan.

Kondisi kesejahteraan masyarakat wilayah Pantura sangat memprihatinkan sejak terjadinya krisis ekonomi. Usaha mikro dan kecil terkena dampak dari krisis yang kenaikan harga yang disertai dengan penurunan daya beli masyarakat ini. Program-program pemerintah yang ditujukan untuk golongan masyarakat ini hanya bersifat proyek jangka pendek dan stimulan saja (tidak *sustainable*).

Kendala utama usaha mikro dan kecil saat itu antara lain:

- Permodalan rendah, volume usaha kecil, manajemen sederhana dan terbatasnya kepemilikan jaminan,
- Akses terhadap sumber modal dari luar sangat rendah,
- Terbatasnya lembaga pembiayaan di pedesaan sehingga permintaan kredit tinggi, dan tidak seimbang dengan penawaran yang disediakan lembaga pembiayaan,
- Lembaga pembiayaan yang tersedia memberlakukan persyaratan yang ketat (*rigid*) dan harus adanya jaminan.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Tangerang berupaya untuk menyesuaikan perubahan tersebut. Pada tahun 2002 Kabupaten Tangerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melakukan kajian bersama dengan Lembaga Sumberdaya Indonesia Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB) untuk menciptakan sistem pemberdayaan masyarakat yang mandiri di wilayah pantura melalui Lembaga Keuangan Mikro yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan usaha masyarakatnya. Studi identifikasi skim-skim pembiayaan bagi pelaku UMKM yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut menghasilkan kesimpulan pemikiran akan perlunya lembaga yang dapat berperan sebagai lembaga alternatif bagi pembiayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2003 dari hasil kajian tersebut, Kabupaten Tangerang melalui BKPMMD mengimplementasikan Lembaga Keuangan Mikro di wilayah pantura dengan nama Lembaga Pembiayaan Pengembangan – Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UMKM) yang mengadopsi sistem Grameen Bank. *Pilot Project* dilaksanakan di Desa Pekayon dan Desa Sukadiri Kecamatan Sukadiri

Pada tahap awal LPP-UMKM mencoba menekankan aspek monetisasi atau pengembangan UMKM melalui intermediasi layanan pembiayaan usaha yang memang selalu menjadi persoalan klasik. Sedangkan pengembangan UMKM melalui aspek non modal diharapkan dapat diperankan oleh lembaga-lembaga paralel, misalkan oleh konsultan dan instansi terkait di PEMDA. LPP-UMKM kemudian menyiapkan skim pembiayaan yang secara khusus diperuntukkan bagi kaum perempuan yang telah memiliki atau akan memulai usaha baru berskala mikro dengan basis *cash flow* secara harian dan skim pembiayaan yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha yang berbasis musiman.

Sistem pelayanan kredit yang diterapkan mereplika sistem Grameen Bank, tetapi dalam prakteknya di lapangan sudah mengalami banyak penyesuaian dengan kondisi dan muatan lokal wilayah dimana sistem ini diterapkan. Dengan demikian, maka secara operasional LPP-UMKM dapat didefinisikan sebagai, lembaga keuangan mikro yang melayani aktivitas simpan pinjam berskala kecil menggunakan pendekatan Grameen Bank bagi pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang, guna membiayai kegiatan ekonomi pokok maupun tambahan serta

mengembangkan budaya menabung (*capital formation*), dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan pengembangan kemandirian usaha.

Tahun 2004 lewat kerjasama antara Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM-IPB) Bogor dengan BKPMD Kabupaten Tangerang, LPP UMKM kembali dikembangkan di Kec. Pakuhaji dan Teluk Naga, kemudian di tahun 2005 di Kec. Sepatan dan Kemiri. Tahun 2006 lewat kerjasama antara BKPMD Kabupaten Tangerang dan PT OXALIS SUBUR dibentuk cabang baru di Kec. Mauk dan Kosambi. Tahun 2007 dengan swakelola, Dewan Pengawas dan Koordinator Operasional dibentuk di Kecamatan Mekar Baru dan Rajeg Kabupaten Tangerang.

### **III.2. Kelembagaan**

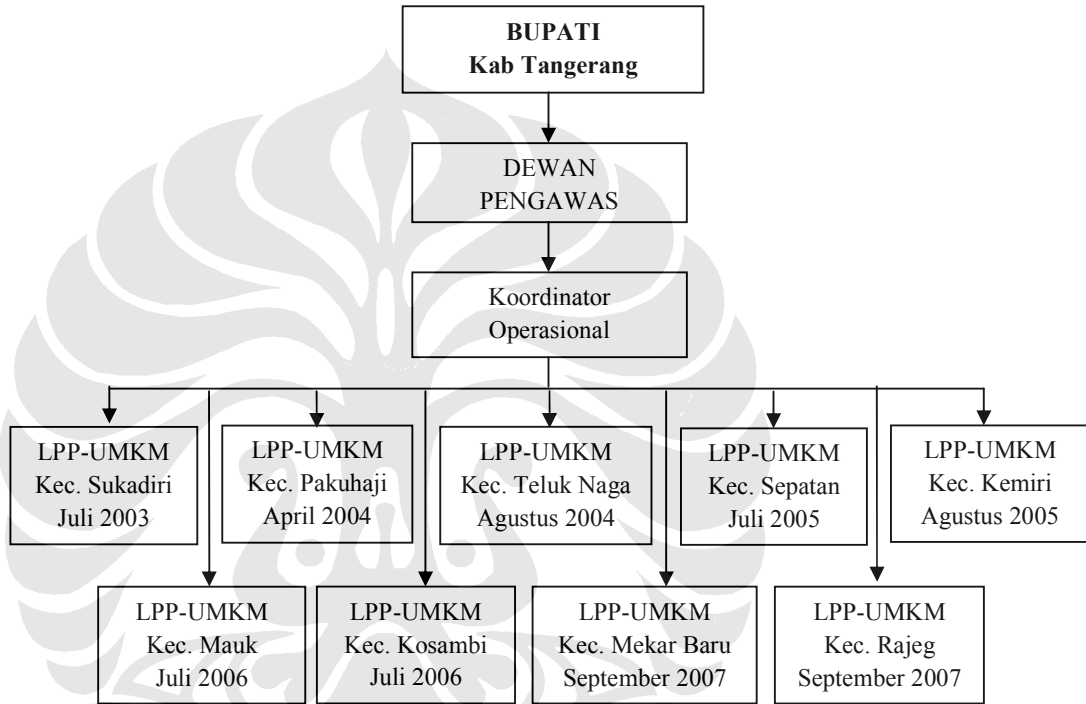
Dalam kerangka membangun sistem kelembagaan LPP-UMKM yang menyatu dan diterima dalam masyarakat serta membangun kekuatan LPP-UMKM itu sendiri, maka diperlukan dua elemen sukses sebagai elemen penting dalam kegiatan ini, yakni sukses kelembagaan (LPP-UMKM) dan sukses sasaran, Evaluasi, pemecahan masalah, pemantapan, dan penguatan harus diupayakan semenjak dini, reguler, dan berkelanjutan agar interaksi antara LPP-UMKM kepada masyarakat sasaran dapat memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan karena pencapaian kedua tujuan memerlukan waktu yang tidak singkat.

Pembentukan LPP-UMKM Kab Tangerang berdasarkan surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 500/Kep.359-Huk/2003 tentang Pembentukan Lembaga Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPP-UMKM). Sebagai dasar hukum operasional dan legalitas lembaga LPP-UMKM Kabupaten Tangerang mengacu pada PERDA NO. 5 TAHUN 2006. LPP UMKM secara eksplisit mengemban amanah dan mandat sebagai (1) Lembaga Keuangan Mikro dan (2) Lembaga pembina usaha mikro dan kecil. Dengan demikian maka keberhasilan LPP-UMKM setidaknya dapat ditunjukkan oleh tiga karakter atau indikator, yakni:

- a. Mampu memberikan layanan kepada kelompok sasaran yang relevan (wanita miskin)

- b. Kuat dan stabil secara finansial, dan
- c. Aktivitas-aktivitas dan layanan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk layanan pembiayaan usaha dan tabungan secara fisik/harfiah, tetapi juga harus memiliki dampak positif yang dapat diukur atau dapat diidentifikasi dari perubahan kehidupan sosial ekonomi anggota.

Bagan III. 1. Struktur Kelembagaan LPP-UMKM Kabupaten Tangerang



Sumber: LPP UMKM Kabupaten Tangerang

Dalam bagan struktur kelembagaan di atas, kedudukan tertinggi lembaga ini adalah Bupati, wakil dari Kabupaten Tangerang sebagai pemilik lembaga ini. Di bawah Bupati ada Dewan Pengawas yang dipilih oleh Bupati. Dewan Pengawas ini diketuai oleh Hj. E. Farida, SE, M.Si. Fungsi Dewan Pengawas adalah mengawasi operasional dan peratanggungjawaban lembaga kepada *stakeholder*. Di bawah Dewan Pengawas ada Koordinator Operasional (KO) yang bertugas mengkoordinasi operasional LPP UMKM di 9 kecamatan, atau bisa juga disebut sebagai kantor pusat. KO terdiri dari Ketua, yang saat ini dijabat oleh Kamaruddin Batubara, Wakil Ketua, Sekretaris dan seorang staf. KO menerima

laporan keuangan dan perkembangan nasabah dari Manajer di tiap kecamatan setiap harinya. Setiap pengajuan pinjaman baru harus disetujui oleh KO terlebih dahulu. Setiap kantor cabang di kecamatan dipimpin oleh seorang manajer cabang yang di bantu oleh seorang Kasie Keuangan dan seorang Kasie Administrasi. Jumlah staf di setiap cabang disesuaikan dengan kebutuhan. Setiap staf bertanggung jawab terhadap +/- 15 Rembug Pusat, yang masing-masing beranggotakan +/- 30 nasabah.

Keberlanjutan sebuah skim kredit sangat erat terkait dengan kelembagaan, khususnya tentang aturan main yang meliputi: prosedur eleksi (*screening process*), sistem insentif (*incentive system*) dan persoalan yang terkait dengan penegakan aturan main (*enforcement*). Bagi lembaga keuangan, ketiga hal ini akan sangat menentukan apakah sebuah skim kredit akan dapat mencapai sasaran secara tepat, yang selanjutnya akan dapat menjamin tercapainya viabilitas finansial yang merupakan komponen penting bagi tercapainya keberlanjutan (*sustainability*) dalam arti sesungguhnya. Kelembagaan skim kredit menjadi sangat kompleks mengingat sifat yang melekat pada pasar kredit yang penuh dengan ketidakpastian, berkaitan dengan paradigma informasi yang tidak sempurna dan tidak simetris (*imperfect and assymetric information paradigm*).

### **III.3. Visi dan Misi**

#### **Visi:**

LPP-UMKM dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat golongan ekonomi lemah di pedesaan Kabupaten Tangerang sehingga pada akhirnya dapat menggerakkan usaha mikro dan kecil menjadi kekuatan ekonomi yang besar sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dan wilayah.

#### **Misi:**

- a. Menjadi lembaga pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah pedesaan Kabupaten Tangerang.
- b. Meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pelaku usaha mikro dan kecil Kabupaten Tangerang melalui perluasan terhadap akses permodalan dan pembinaan teknis (non permodalan).



- c. Menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial bagi Kabupaten Tangerang dengan tetap mengedepankan keseimbangan fungsi ekonomi dan fungsi sosial.

#### **III.4. Pendekatan Operasional**

Secara ringkas, pendekatan operasional LPP UMKM dapat dijabarkan dalam beberapa poin berikut:

- a. Secara khusus ditujukan kepada kelompok masyarakat produktif pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang.
- b. Tidak memerlukan agunan (kolateral) dan penjamin, persyaratannya cukup dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku.
- c. Nasabah tidak perlu datang ke lembaga keuangan, sebaliknya lembaga keuangan (LPP-UMKM) yang akan mendatangi nasabah.
- d. Jasa yang dibebankan sebagai pengganti atas pelayanan “langsung” besarnya 2,5 % perbulan, tidak ada potongan berupa apapun.
- e. Metoda pembayaran angsuran (pokok dan jasa pinjaman) dilakukan secara mingguan dalam jumlah kecil.
- f. Setiap nasabah tergabung dalam kelompok yang setara dan saling mendukung satu sama lain.
- g. Supervisi kegiatan bagi para peminjam.
- h. Tabungan wajib mingguan dan tabungan sukarela bagi setiap nasabah.
- i. Disiplin kredit yang ketat dan berlaku untuk semua nasabah.
- j. Transparansi; semua transaksi dilakukan secara terbuka pada pertemuan mingguan.

#### **III.5. Tahapan Penerapan Kredit**

- 1) Pertemuan Umum
- 2) Uji Kelayakan
- 3) Latihan Wajib Kumpulan
- 4) Ujian Pengesahan Kumpulan
- 5) Pembentukan Rembug Pusat
- 6) Pengelolaan

### **III.5.1. Pertemuan Umum**

Pertemuan Umum (PU) adalah rapat umum yang dilakukan di lokasi terpilih di tingkat kecamatan dan tingkat desa. PU dihadiri oleh pemuka masyarakat, aparat kecamatan, dinas-dinas terkait, aparat desa, dan sebanyak mungkin para calon nasabah potensial (perempuan) dapat hadir. Tujuannya adalah sosialisasi atau pemberitahuan secara formal mengenai program yang akan dilaksanakan. Selain itu, pertemuan ini juga dimaksudkan untuk melihat reaksi dan minat masyarakat terhadap program yang akan diluncurkan tersebut.

Penjelasan yang disampaikan dalam PU meliputi:

- a. Maksud dari program perkreditan Lembaga Keuangan Mikro atau LPP UMKM Kabupaten Tangerang.
- b. Tata cara pelaksanaan dan prosedur peminjaman.
- c. Sasaran dan syarat-syarat keanggotaan.
- d. Tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait.

Diharapkan sedapat mungkin agar segenap aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan penduduk golongan ekonomi lemah (miskin) dapat hadir dalam PU tersebut. Setelah PU dilaksanakan, para calon anggota potensial didaftar sebagai dasar pendataan untuk tahap berikutnya (Uji Kelayakan). Selanjutnya petugas lapangan akan menetapkan waktu wawancara untuk uji kelayakan yang terlebih dahulu didiskusikan dengan kepala desa (aparat) setempat.

### **III.5.2. Uji Kelayakan**

Uji Kelayakan (UK) merupakan kegiatan untuk memotret kondisi sosial ekonomi calon anggota, yang meliputi kondisi rumah, aset rumah tangga dan pendapatan. Informasi diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah terstandarisasi oleh Grameen Bank (lihat lampiran 1). Wawancara dilakukan oleh petugas lapangan di rumah calon anggota dan sebaiknya dihadiri oleh kepala keluarga agar diperoleh data yang akurat.

### **III.5.3. Latihan Wajib Kumpulan**

Setelah calon anggota dinyatakan layak, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan Latihan Wajib Kumpulan (LWK). LWK merupakan aktivitas yang wajib diikuti oleh setiap calon anggota. LWK dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan durasi waktu antara 60 hingga 90 menit setiap harinya. LWK memberikan penjelasan secara umum hal-hal sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat untuk mengikuti LWK
- b. Peraturan-peraturan dalam LWK
- c. Hak dan kewajiban anggota
- d. Tata cara pengajuan dan pengambilan pinjaman

LWK sebagai wahana menanamkan disiplin para anggota dan menumbuhkan rasa kebersamaan di antara anggota. Selain itu mempersiapkan anggota agar benar-benar mengerti tentang peranan dan tanggung jawabnya sebagai anggota. Dalam LWK ini, calon anggota dikelompokkan dalam beberapa kumpulan yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Calon anggota berhak menentukan sendiri kumpulannya.

### **III.5.4. Ujian Pengesahan Kumpulan**

Pada hari ketiga se usai LWK diadakan Ujian Pengesahan Kumpulan (UPK). Semua materi LWK diujikan dalam UPK oleh petugas lapang senior. Jika calon anggota kumpulan telah memahami materi latihan, maka kumpulan dianggap lulus dan siap untuk membentuk Rembug Pusat. Sebaliknya, kumpulan bisa dinyatakan tidak lulus jika calon anggota masih belum memahami materi pelatihan. Jika demikian maka pelatihan harus dilanjutkan sampai dinyatakan lulus.

### **III.5.5. Pembentukan Rembug Pusat**

Setelah lulus dalam Latihan Wajib Kumpulan (LWK), maka anggota akan membentuk Rembug Pusat (RP). Rembug Pusat merupakan federasi dari beberapa kumpulan yang terdiri dari minimal 3 kumpulan (15 anggota) dan maksimal 8 kumpulan (40 anggota). Rembug Pusat diketuai oleh seorang anggota dan dibantu oleh seorang wakil ketua yang dipilih secara musyawarah

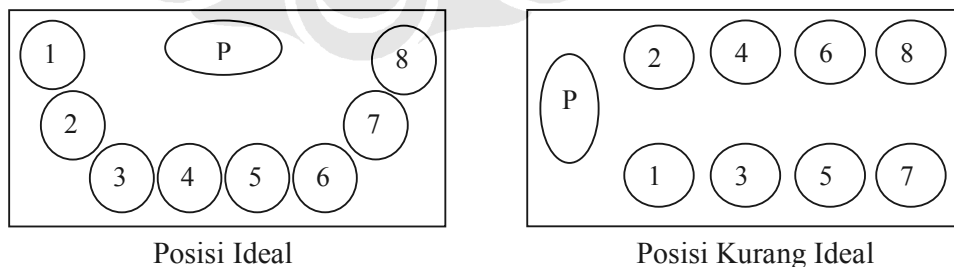
di antara anggota. Rembug Pusat ini kemudian menentukan waktu berkumpul seminggu sekali selama sekitar 1 jam. Perlu ditekankan disini, bahwa sistem Grameen Bank memang melatih anggotanya dalam berdemokrasi, bebas menyuarakan pendapatnya dalam kelompok (kumpulan dan Rembug Pusat), dan bebas menentukan sendiri anggota kelompoknya.

Semua aktivitas LPP UMKM (menabung, pengajuan pinjaman, pencairan pinjaman dan pembayaran angsuran) dilakukan dalam pertemuan mingguan Rembug Pusat yang wajib dihadiri oleh setiap anggota. Frekuensi kehadiran dalam pertemuan mingguan Rembug Pusat, kedisiplinan dalam pembayaran angsuran pinjaman, dan tabungan sukarela menjadi kriteria penilaian bagi anggota untuk mendapatkan pinjaman berikutnya. Parameter-parameter tersebut merupakan tolok ukur terjaganya harmonisasi dalam Rembug Pusat yang berimplikasi pada kinerja dan performa LPP UMKM Kabupaten Tangerang.

Untuk menciptakan tempat yang nyaman dan kondusif bagi keberlangsungan Rembug Pusat, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan:

- Memilih tempat yang dapat menampung semua anggota dan nyaman.
- Memastikan semua anggota dapat duduk melantai (*lesehan*).
- Mengatur posisi duduk setiap anggota berdasarkan kumpulan.
- Menentukan posisi duduk petugas yang dapat menjangkau seluruh kumpulan (lihat bagan III.2.)

Bagan III. 2. Posisi Duduk dalam Pertemuan Mingguan Rembug Pusat



Keterangan:

P : posisi petugas staf lapangan LPP UMKM

1 – 8 : posisi anggota kumpulan 1 - 8

Sumber: LPP UMKM Kabupaten Tangerang

### **III.5.6. Pengelolaan Kredit**

Pengelolaan kredit dalam LPP UMKM Kabupaten Tangerang dibagi dalam 3 jenis sebagai berikut

#### **a) Pengelolaan Kumpulan**

Dalam manajemen kumpulan harus selalu diupayakan adanya keterbukaan dalam setiap aktivitas LPP UMKM Kabupaten Tangerang, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Setiap anggota diberi kesempatan untuk menjadi ketua kumpulan maupun ketua Rembug Pusat untuk setiap kurun waktu tertentu. Pengalaman memimpin akan meningkatkan kapasitas pribadi, termasuk rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab.

Jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal, maka kumpulan tersebut berhak memasukkan anggota baru yang dapat diterima dengan baik oleh setiap anggota kumpulan tersebut, memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dan mengikuti serta lulus Latihan Wajib Kumpulan (LWK). Keputusan penerimaan calon anggota baru ada di tangan anggota kumpulan lainnya, tanpa intervensi sedikitpun oleh petugas lapang.

#### **b) Pengelolaan Administrasi**

Salah satu esensi LPP UMKM Kabupaten Tangerang adalah keterbukaan pada setiap aktivitas. Manajemen administrasi yang terbuka dan tertib akan menjamin keberhasilan dan keberlanjutan lembaga ini.

Manajemen di tingkat kumpulan, Rembug Pusat, kantor kecamatan dan kantor pusat (koordinator operasional) harus mengadopsi sistem perbankan. Transaksi harian harus segera dibukukan dengan sistem komputer. Setiap periode tertentu, baik mingguan dan bulanan dibuat laporan yang mencakup keadaan anggota, jumlah pinjaman, tabungan, wilayah kerja, neraca, laba rugi dan sebagainya.

#### **c) Pengelolaan Penyaluran Kredit**

Penyaluran kredit harus diikuti dengan penerapan disiplin kredit. Pengertian disiplin disini termasuk disiplin supervisi penggunaan pinjaman

oleh anggota. Harus dapat dipastikan bahwa pinjaman benar-benar digunakan untuk tujuan produktif yang telah disepakati pada saat pengajuan dan realisasi pinjaman. Tanpa supervisi yang ketat, besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan kredit.

Pemberian besaran kredit harus mempertimbangkan kemampuan anggota untuk mengembalikan (*capacity to repay*). Pemberian jumlah kredit yang di luar kemampuan anggota untuk mengembalikannya justru akan menyensarakannya di kemudian hari. Penting pula untuk menekankan pada anggota mengenai pentingnya mobilisasi tabungan sebagai upaya mengatasi kebutuhan darurat dan pemupukan modal (*capital formation*) dalam rangka peningkatan kemandirian usaha.

### **III.6. Pinjaman**

#### **III.6.1. Tujuan Pinjaman**

Pinjaman digunakan untuk menambah modal usaha, bukan keperluan yang lain dan tidak boleh dipinjamkan kembali.

#### **III.6.2. Syarat Memperoleh Pinjaman**

Anggota diperkenankan untuk mengajukan pinjaman pertama jika sudah memenuhi persyaratan berikut:

- a. Telah lulus Ujian Pengesahan Kumpulan
- b. Mengikuti LWK 3 hari (tidak pernah absen)
- c. Sudah memiliki tabungan wajib
- d. Mengajukan pinjaman dengan menyebutkan tujuan pinjaman

Anggota diperkenankan untuk mengajukan pinjaman berikutnya jika memenuhi persyaratan berikut:

- a. Sudah melunasi pinjaman pertama
- b. Tidak ada tunggakan anggota lain dalam kumpulannya
- c. Tingkat kehadiran dalam pertemuan mingguan Rembug Pusat minimal 70%.

### III.6.3. Besar Pinjaman

Besar pinjaman tahap pertama dan berikutnya dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pinjaman I  $\leq$  Rp 500.000,-
- b. Pinjaman II  $\leq$  Rp 1.000.000,-
- c. Pinjaman III  $\leq$  Rp 1.500.000,-
- d. Pinjaman IV  $\leq$  Rp 2.000.000,-

Penentuan nilai pinjaman pertama dengan mengacu pada tingkat pendapatan per kapita keluarga (lihat tabel III.1).

Tabel III. 1. Penentuan Nilai Pinjaman Pertama

No	Pendapatan Per Kapita (I)	Nilai Pinjaman
1.	$I < \text{Rp. } 600.000,-$	Rp. 100.000,-
2.	$\text{Rp. } 600.000,- < I \leq \text{Rp. } 1.050.000,-$	Rp. 200.000,-
3.	$\text{Rp. } 1.050.000,- < I \leq \text{Rp. } 1.200.000,-$	Rp. 300.000,-
4.	$\text{Rp. } 1.200.000,- < I \leq \text{Rp. } 1.500.000,-$	Rp. 400.000,-
5.	$I > \text{Rp. } 1.500.000,-$	Rp. 500.000,-

Sumber: LPP UMKM Kabupaten Tangerang

Nilai pinjaman kedua dan seterusnya ditentukan dari tiga indikator yang ditetapkan, yaitu: a) persentase rata-rata tabungan sukarela per minggu, b) persentase tingkat kehadiran dalam pertemuan mingguan Rembug Pusat, c) persentase kecepatan pelunasan. Peningkatan nilai pinjaman per periode maksimal Rp. 500.000,-. Ketiga indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persentase rata-rata tabungan sukarela per minggu

Indikator ini dihitung dengan:

$$\% \text{ tabungan sukarela} = \frac{\text{rata-rata tabungan sukarela}}{\text{Rp. } 7.000,-} \times 100 \%$$

Dimana, Rp. 7.000,- adalah nilai standar yang ditetapkan dan rata-rata tabungan sukarela =  $\frac{\text{saldo saat pelunasan pinjaman} - \text{saldo saat pelunasan sebelumnya}}{\sum \text{minggu pelunasan}}$

b. Persentase tingkat kehadiran

Karena pinjaman yang digulirkan tidak menerapkan sistem jaminan tambahan yang berupa agunan (*collateral*) dan penjamin, maka disiplin kehadiran merupakan faktor penting yang selalu diperhatikan. Persentase jumlah kehadiran anggota selama satu periode pinjaman harus mencapai  $\geq 70\%$ . Jika di bawah  $70\%$ , maka anggota bersangkutan akan kehilangan hak sebagai anggota peminjam. Indikator ini dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ tingkat kehadiran} = \frac{\sum \text{minggu pelunasan} - \text{jumlah ketidakhadiran}}{\sum \text{minggu pelunasan}} \times 100\%$$

c. Persentase kecepatan pelunasan

Setiap anggota LPP UMKM Kabupaten Tangerang diperbolehkan melunasi pinjaman lebih cepat dari waktu sebelum jatuh tempo, dengan ketentuan paling lama 6 bulan dan paling cepat 3 bulan. Sebagai konsekuensinya, bagi anggota yang melunasi pinjaman lebih cepat akan mendapatkan bonus atau kelebihan jasa pinjaman (restitusi), sedangkan anggota yang melewati batas jatuh tempo akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan jumlah keterlambatan pembayaran.

$$\% \text{ pelunasan} = \frac{\text{sisa minggu pelunasan} \times 100}{25} \times 100\%$$

Dimana, lama pelunasan normal adalah 25 minggu.

Dari ketiga indikator tersebut, dapat dihitung persentase kenaikan pinjaman dan nilai pinjaman berikutnya dengan rumus:

$$\% \text{ Kenaikan Pinjaman} = \frac{(\% \text{ tabungan sukarela} + \% \text{ kehadiran} + \% \text{ pelunasan})}{3}$$

$$\text{Nilai Pinjaman} = \text{pinjaman sebelumnya} + (\% \text{ kenaikan pinjaman} \times \text{Rp. } 500.000,-)$$

Catatan: Kenaikan pinjaman per periode maksimal Rp. 500.000,-



### III.6.4. Jenis Pinjaman

Skim pinjaman yang dilayani oleh LPP UMKM Kabupaten Tangerang ada 2 jenis, yaitu:

a. Skim Mikro Mitra Usaha (MMU)

Skim ini diperuntukkan bagi masyarakat pelaku UMK yang memiliki basis usaha dan pendapatan harian. Pokok dan jasa pinjaman diangsur 100% secara mingguan selama 25 minggu.

b. Skim Dana Mitra Usaha (DMU)

Skim ini diperuntukkan bagi masyarakat pelaku UMK dengan basis usaha dan pendapatan musiman serta memiliki basis usaha dengan pendapatan harian. Ketentuannya adalah 70% pinjaman pokok dan 100% jasa pinjaman diangsur secara mingguan selama 25 minggu dan 30% dari pokok dilunasi pada saat panen atau pada minggu ke 25.

### III.6.5. Jasa Pinjaman

Besar jasa pinjaman adalah 2,5% per bulan atau 15% per 6 bulan. Angsuran per minggunya dihitung dengan rumus:

$$\text{Angsuran per minggu} = \frac{\text{pokok pinjaman} + (\text{pokok pinjaman} \times \text{jasa pinjaman 6 bulan})}{\text{Periode pinjaman (minggu)}}$$

Contoh angsuran per minggu tiap pokok pinjaman sebagai berikut:

Tabel III. 2. Contoh Hasil Perhitungan Angsuran per Minggu (dalam Rupiah)

No	Pokok Pinjaman (a)	Jasa per 6 bulan (b)	Pokok + Jasa Pinjaman (c = a + b)	Jangka Waktu (d)	Angsuran per Minggu (e = c : d)
1.	100.000,-	15.000,-	115.000,-	25 minggu	4.600,-
2.	200.000,-	30.000,-	230.000,-	25 minggu	9.200,-
3.	300.000,-	45.000,-	345.000,-	25 minggu	13.800,-
4.	400.000,-	60.000,-	460.000,-	25 minggu	18.400,-
5.	500.000,-	75.000,-	575.000,-	25 minggu	23.000,-

Sumber: LPP UMKM Kabupaten Tangerang

### III.6.6. Pencairan Pinjaman

Pencairan pinjaman tidak dilakukan sekaligus untuk seluruh anggota, tetapi menggunakan sistem 2 – 2 – 1. Setiap kumpulan terdiri dari 5 anggota, dimana semua anggota tidak langsung mendapat pinjaman. Yang pertama kali mendapat pinjaman adalah 2 orang anggota kumpulan, 1 minggu kemudian 2 anggota berikutnya, dan seminggu kemudian 1 orang terakhir yang merupakan ketua kumpulan. Ilustrasinya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III. 3. Ilustrasi Pencairan Pinjaman

Anggota	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 5
1 dan 2	Pengajuan	Pencairan	GP	Angsuran 1	Angsuran 2
3 dan 4	tunggu	Pengajuan	Pencairan	GP	Angsuran 1
5 (ketua)	tunggu	tunggu	Pengajuan	Pencairan	GP

Sumber: LPP UMKM Kabupaten Tangerang

*Grace Period* (GP) adalah waktu tenggang seminggu, tujuannya agar pinjaman bisa berputar dulu. Namun pada *Grace Period* ini nasabah boleh tetap bayar angsuran sehingga akan menerima bonus pada saat pelunasan.

### III.7. Tabungan

#### III.7.1. Tabungan Wajib

Tabungan wajib terdiri dari 3 macam, yaitu:

- a. Tabungan LWK, besarnya Rp. 500,- (sekali selama menjadi anggota)
- b. Tabungan Minggon (mingguan), yang besarnya ditentukan oleh besar pinjaman, dengan ketentuan sebagai berikut (L = nilai pinjaman).
  - $L < \text{Rp. } 500.000,-$  = Rp. 500,-
  - $\text{Rp } 500.000,- \leq L < \text{Rp } 1.000.000,-$  = Rp. 1.000,-
  - $\text{Rp } 1.000.000,- \leq L < \text{Rp } 1.500.000,-$  = Rp. 1.500,-
  - $\text{Rp } 1.500.000,- \leq L < \text{Rp } 2.000.000,-$  = Rp. 2.000,-
  - $\text{Rp } 2.000.000,- \leq L < \text{Rp } 2.500.000,-$  = Rp. 2.500,-
  - Dan seterusnya.
- c. Tabungan 5% dari setiap pinjaman yang diterima

Setiap tabungan wajib mendapat balas jasa sebesar 6% per tahun atau 0,5% per bulan yang dikalikan dengan saldo terendah pada bulan taqwim, tanpa biaya administrasi.

### **III.7.2. Tabungan Sukarela**

Ketentuan Tabungan Sukarela adalah sebagai berikut:

- a. Dapat diambil kapan saja
- b. Tabungan pertama minimal Rp. 3.500,- dan membeli buku tabungan seharga Rp. 2.000,- per buku. Tabungan berikutnya minimal Rp. 500,-.

Setiap tabungan sukarela mendapat balas jasa sebesar 6% per tahun atau 0,5% per bulan yang dikalikan dengan saldo terendah pada bulan taqwim, tanpa biaya administrasi.

### **III.7.3. Penggunaan Tabungan Wajib**

- a. Sebagai Dana Cadangan, yaitu untuk keperluan-keperluan yang membutuhkan dana besar, misal: renovasi rumah, belanja modal, dan lainnya. Dana Cadangan dapat diambil dari Tabungan Minggon setelah 1 tahun dan sudah melunasi pinjaman, sedangkan dari tabungan LWK dan 5% dapat diambil setelah tidak lagi menjadi anggota LPP UMKM Kabupaten Tangerang.
- b. Sebagai Dana Talangan bila sewaktu-waktu ada anggota yang melalaikan kewajibannya. Setelah dihitung sisa tunggakan pinjaman anggota yang lalai tersebut dan dibebankan sama rata kepada sesama anggota Rembug Pusatnya. Namun jika kasusnya adalah meninggal dunia atau dinyatakan tidak mampu dengan keterangan dari Kepala Desa setempat dan persetujuan pimpinan LPP UMKM kecamatan yang bersangkutan, maka sisa pinjaman anggota tersebut akan dianggap lunas atau diputihkan. Dana Talangan dapat diambil dari Tabungan Minggon dan 5%, namun maksimal hanya 75% dari total tabungan tiap anggota. Dana Talangan ini diterapkan untuk menumbuhkan rasa memiliki di antara anggota dan secara bersama-sama akan melakukan pengawasan terhadap sesama anggota lain. Anggota pun akan semakin

sadar akan pentingnya melunasi pinjaman tepat waktu demi keberlanjutan pinjaman berikutnya.

#### **III.7.4. Penggunaan Tabungan Sukarela**

Anggota disarankan memiliki tabungan sukarela untuk keperluan:

- a. Membayar angsuran ketika tidak memiliki uang
- b. Kebutuhan jangka panjang (keperluan lebaran, tabungan pendidikan, dan lainnya).
- c. Keperluan mendadak (sakit, keluarga meninggal, dan lainnya).

#### **III.8. Kinerja hingga Maret 2008**

Dengan melihat data keuangan LPP UMKM (lihat tabel III.4.), dapat diketahui semenjak berdiri hingga sekarang yang menunjukkan tren peningkatan rata-rata di atas 100% per tahunnya, kita dapat menyimpulkan bahwa lembaga ini adalah sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Sebuah LKM yang dikelola oleh pemerintah daerah namun dapat menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Berawal dari modal Pemda Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 260.000.000,- dengan jumlah anggota 564 orang, kini LPP UMKM memiliki aset sebesar Rp. 12.105.095.043,- dan telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp. 51.633.700.000 untuk 17.027 anggota atau rata-rata per anggota telah mendapat pinjaman Rp. 3.000.000,-. Lembaga ini juga berhasil mendorong masyarakatnya untuk menabung sebagian pendapatan mereka, dapat dilihat dari nilai tabungan anggota yang besarnya Rp. 4.584.234.650,- hampir menyamai modal dari Pemda Kabupaten Tangerang yang sebesar Rp. 4.760.000.000,-. Yang menarik lagi adalah LPP UMKM pada 2007 telah menyumbangkan PAD bagi Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 499.026.515,-.

Tabel III. 4. Kinerja LPP UMKM hingga Maret 2008 (dalam Rupiah)

INDIKATOR	2003	2004	2005	2006	2007	Maret 2008
<b>Penyertaan Modal Pemda Kab. Tangerang</b>	260.000.000	760.000.000	1.760.000.000	3.260.000.000	3.260.000.000	4.760.000.000
<b>1. Jangkauan Pelayanan</b>						
a. Jumlah Desa/Kelurahan	3	9	24	39	44	53
b. Kampung Terlayani	12	39	140	199	226	267
c. Jumlah Rembug Pusat	33	83	262	451	553	639
d. Jumlah Kumpulan	133	347	1.101	2.332	3.036	3452
e. Jumlah Anggota	564	1.721	5.778	11.645	14.821	17.027
<b>2. Kumulatif Penyaluran Pinjaman</b>	223.600.000	1.722.900.000	6.595.650.000	18.080.300.000	38.312.600.000	51.633.700.000
<b>Penyaluran Pinjaman</b>	223.600.000	1.499.300.000	4.872.750.000	11.484.650.000	20.232.300.000	13.321.100.000
<b>3. Pengembalian Pinjaman</b>						
a. Nyata Dibayar	53.584.000	1.139.096.200	4.604.860.005	13.771.528.800	31.311.090.600	42.759.200.700
b. Seharusnya Dibayar	50.104.000	1.033.321.000	3.993.535.955	12.297.641.100	28.289.619.000	38.661.984.000
c. Kolektibilitas	106,95%	110%	114,25%	111,99%	110,68%	110,6%
d. NPL	0 %	0 %	0 %	0,38 %	0,38 %	0,33 %
<b>4. Akumulasi Tabungan</b>	28.330.400	183.371.950	679.384.695	1.761.880.050	3.064.405.050	4.584.234.650
a. Tabungan Wajib LWK	283.500	860.000	2.889.000	5.810.500	7.400.500	8.504.000
b. Tabungan Wajib Mingguan	4.116.500	43.141.900	147.765.500	361.395.300	772.139.500	931.237.400
c. Tabungan 5% Pinjaman	11.130.000	80.697.500	292.256.000	713.224.000	1.441.671.500	1.827.656.500
d. Tabungan Sukarela	12.800.400	58.675.550	236.474.195	681.450.250	843.193.550	1.816.836.750
<b>5. Pendapatan LPP-UMKM</b>	7.763.900	163.047.800	646.873.850	1.964.023.600	4.360.544.800	5.911.544.000

Sumber: Laporan Keuangan LPP UMKM Kabupaten Tangerang Maret 2008

LPP UMKM Kabupaten Tangerang saat ini telah mempekerjakan 91 karyawan. Untuk menanggulangi kredit bermasalah sampai proses pemutihan piutang (*write off*), maka sejak Januari 2006 LPP UMKM telah menerapkan Penyusutan Piutang Aktiva Produktif (PPAP) sebesar 3% per tahun. Sejak Januari 2008 PPAP diturunkan hingga hanya 1% per tahun, karena kredit macet yang sangat rendah. Distribusi penggunaan pinjaman dapat dilihat pada tabel III.5. berikut:

Tabel III. 5. Penggunaan Pinjaman Nasabah LPP UMKM (Maret 2008)

No	Penggunaan Pinjaman	Jumlah	%
1.	Pertanian dan peternakan (a+b+c+d)	2.241	13,86
	a. Tani	287	1,78
	b. Ternak	169	1,05
	c. Dagang hasil pertanian	1.423	8,80
	d. Dagan hasil peternakan	362	2,24
2.	Perikanan (a+b)	1.170	7,24
	a. Nelayan	412	2,55
	b. Dagang hasil perikanan	758	4,69
3.	Dagang makanan	4.426	27,38
4.	Dagang bukan makanan	2.200	13,61
5.	Warung	2.204	13,64
6.	Jasa transportasi	1.491	9,22
7.	Jasa perbengkelan	287	1,78
8.	Industri rumah tangga dan kerajinan	340	2,10
9.	Lain-lain	1.805	11,17
	<b>Jumlah</b>	<b>16.164</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Keuangan LPP UMKM Kabupaten Tangerang Maret 2008

Kinerja LPP UMKM memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam memandang keberadaan pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah pedesaan. Dengan pendekatan dan mekanisme khusus (*special selivery mechanism*), telah terbangun citra bahwa sesungguhnya masyarakat berstrata ekonomi lemah pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah pedesaan adalah layak dibiayai (*feasible*) meski belum dapat mengakses kredit perbankan (*bankable*).

Keberadaan lembaga ini juga dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effects*) yang besar dalam bentuk penciptaan dan penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan skala usaha mikro dan kecil. Kehadiran LPP UMKM lambat laun dapat menggerakkan usaha mikro dan kecil menjadi kekuatan ekonomi yang besar, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.